

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA SAMARINDA

TAHUN 2013-2014

Oleh : Suyatin

*Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

---

### ABSTRACT

This research is meant to know and analyze the performance of the finance of the local government , Samarinda , in the year 2013-2014. The tools of the analisis used is racional one which consists of the level of decentralization , the dependence of the local government finance , the self-standing , effectivity of the original government income and local government tax. The result of the research is that the ability of the local government concerned in the realization of decentralization is better if it is seen from the improvement of it .

The level of the dependence of the finance is smaller and smaller and the self-effort is higher though the mobilazation of the receipt of the original income goes down where in 2014 is not effective .The local government in collecting tax is good enough either in 2013 or in 2014. So it can be concluded generally that the performance of the team goes better in 2014

---

**Keywords : income, improvement, local, government, original, tax**

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Selaras dengan semangat perubahan tersebut, saat ini sedang berkembang paradigma pelaksanaan pembangunan yaitu setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah hendaknya dilakukan secara transparansi dan dapat diukur tingkat keberhasilannya (akuntabilitas). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang lebih baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan secara efektif dan efisien, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menganut asas akuntabilitas dan transparansi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Halim, 2007 : 229). Ditetapkan juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Yuliandriansyah, 2009). Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah kota Samarinda Tahun 2013-2014. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan, maupun sebagai informasi bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

## II. DASAR TEORI

### **Keuangan daerah**

Keuangan daerah menurut Mamesah (dalam Halim, 2004:18) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Menurut M.Yusuf (2010 :1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen asset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial maupun nonfinansial (Ihyaul Ulum, 2012 :20). Menurut Halim (2004:24) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Di dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian/aktivitas.

James B. Whittaker (1995) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok dalam perwujudan good governance. Pemerintah diminta melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai. Faktanya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Anwar Nasution dalam artikel AntaraNews tahun 2007 menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPK, ternyata kinerja pemerintah daerah (pemda) di tanah air masih jauh dari memuaskan karena belum transparan dan akuntabel.

### **Analisis Rasio Keuangan Daerah**

Menurut Halim dalam Hamzah (2008), di dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian/aktivitas.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan

rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

### **Derajat Desentralisasi**

Menurut Mahmudi (2010 : 142) derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan dengan :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

### **Rasio Ketergantungan keuangan daerah**

Rasio ketergantungan keuangan daerah ditung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka makin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan / pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan dengan :

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan Daerah}} \times 100\% \text{ (Mahmudi : 2010)}$$

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut. Disamping itu, rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Adapun rumusnya adalah (Mahmudi : 2010) :

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

### **Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Menurut Mahmudi (2010:143) Rumus yang digunakan :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dikategorikan sebagai berikut :

Sangat efektif	: > 100%
Efektif	: 100%
Cukup Efektif	: 90% - 99%
Kurang efektif	: 75% - 89%
Tidak efektif	: < 75% (Mahmudi : 2010)

### **Rasio Efektivitas Pajak Daerah**

Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Adapun rumus yang digunakan :

$$\text{Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\% \text{ (Mahmudi : 2010)}$$

### III. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan untuk mengetahui Kinerja Keuangan daerah Kota Samarinda adalah data sekunder berupa Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 dan 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Alat analisis yang digunakan adalah analisis rasio terdiri dari Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, dan Rasio Efektifitas Pajak Daerah

### IV. HASIL PENELITIAN

Tabel 1 dan 2 adalah data tentang target dan realisasi pendapatan daerah Kota Samarinda untuk tahun 2013 dan tahun 2014. Data ini bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2013

JENIS PENERIMAAN	TARGET 2013 - PERUBAHAN	REALISASI 2013
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp 2,697,071,997,283.01</b>	<b>Rp 2,567,673,073,696.33</b>
<b>4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>Rp 286,904,776,836.46</b>	<b>Rp 338,198,739,091.33</b>
4.1.1. Hasil Pajak Daerah	Rp 180,737,978,237.00	Rp 197,823,372,081.33
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah	Rp 52,702,351,926.00	Rp 55,667,331,774.13
4.1.2.01 <i>Retribusi Jasa Umum</i>	Rp 12,046,206,700.00	Rp 12,790,091,485.00
4.1.2.02 <i>Retribusi Jasa Usaha</i>	Rp 13,081,145,226.00	Rp 13,547,234,214.00
4.1.2.03 <i>Retribusi Perizinan Tertentu</i>	Rp 27,575,000,000.00	Rp 29,330,006,075.13
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 10,375,000,000.00	Rp 9,530,145,605.76
<b>4.2 DANA PERIMBANGAN.</b>	<b>Rp 1,442,843,620,896.55</b>	<b>Rp 1,465,390,850,065.00</b>
<b>4.2.1. BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>	<b>Rp 846,612,432,896.55</b>	<b>Rp 876,761,756,065.00</b>
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak.	Rp 130,595,955,407.00	Rp 152,439,467,178.00

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA.	Rp 716,016,477,489.55	Rp 724,322,288,887.00
4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 579,634,968,000.00	Rp 579,634,968,000.00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 16,596,220,000.00	Rp 8,994,126,000.00
4.2.3.01. Pendidikan 4.2.3.02. Sanitasi 4.2.3.03. Keluarga Berencana 4.2.3.04. Perumahan dan Pemukiman 4.2.3.05. Perdagangan (Pasar)		
<b>4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>Rp 967,323,599,550.00</b>	<b>Rp 764,083,484,550.00</b>
4.3.1. Pendapatan Hibah	Rp 14,091,750.00	Rp 14,091,750.00
4.3.2. Dana Darurat		
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pem Prov	Rp 386,934,404,800.00	Rp 322,934,539,800.00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	Rp 150,924,903,000.00	Rp 150,924,903,000.00
4.3.4.01. Dana Penyesuaian/Tambahan Dana Alokasi Umum	Rp 150,924,903,000.00	Rp 150,924,903.00
4.3.4.01.01. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp 5,419,500,000.00	Rp 5,419,500,000.00
4.3.4.01.02. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp 145,505,403,000.00	Rp 145,505,403,000.00
4.3.4.01.03. Dana BOS		
4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp 429,450,200,000.00	Rp 290,209,950,000.00
4.3.5.01. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp 429,450,200,000.00	Rp 290,209,950,000.00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2,697,071,997,283.01</b>	<b>Rp 2,567,673,073,696.33</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Tabel 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2014

Jenis Penerimaan	TARGET DAN REALISASIPENDAPATAN DAERAH TAHUN 2014	
	Target 2014 - Perubahan	Realisasi 2014
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp 3,048,932,183,316.26</b>	<b>Rp 2,845,030,033,446.66</b>
<b>4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>Rp 577,555,670,510.00</b>	<b>Rp 435,492,590,745.66</b>
4.1.1. Hasil Pajak Daerah	Rp 224,901,900,000.00	Rp 238,511,683,138.63
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah	Rp 65,277,376,757.00	Rp 66,907,582,372.00
4.1.2.01 <i>Retribusi Jasa Umum</i>	Rp 25,587,240,381.00	Rp 26,291,507,599.00
4.1.2.02 <i>Retribusi Jasa Usaha</i>	Rp 11,664,136,376.00	Rp 12,754,954,382.00
4.1.2.03 <i>Retribusi Perizinan Tertentu</i>	Rp 28,026,000,000.00	Rp 27,861,120,391.00
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 41,119,258,301.00	Rp 10,879,066,353.40
<b>4.2 DANA PERIMBANGAN.</b>	<b>Rp 1,525,622,197,752.00</b>	<b>Rp 1,538,150,051,351.00</b>
4.2.1. BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	Rp 890,352,104,752.00	Rp 917,512,184,351.00
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak.	Rp 160,268,913,651.00	Rp 128,314,529,226.00
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.	Rp 730,083,191,101.00	Rp 789,197,655,125.00
4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 614,366,913,000.00	Rp 614,366,913,000.00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 20,903,180,000.00	Rp 6,270,954,000.00
4.2.3.01. Pendidikan	Rp 18,750,790,000.00	Rp 5,625,237,000.00
4.2.3.02. Sanitasi	-	
4.2.3.03. Keluarga Berencana		
4.2.3.04. Perumahan dan Pemukiman		
4.2.3.05. Perdagangan (Pasar)	Rp 2,152,390,000.00	Rp 645,717,000.00
<b>4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>Rp 945,754,315,054.26</b>	<b>Rp 871,387,391,350.00</b>
4.3.1. Pendapatan Hibah		Rp 14,091,750.00
4.3.2. Dana Darurat		
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Prov. & Pemda lainnya	Rp 363,106,487,054.26	Rp 288,725,471,600.00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	Rp 183,622,628,000.00	Rp 183,622,628,000.00
4.3.4.01. Dana Penyesuaian/Tambahan Dana Alokasi Umum	Rp 183,622,628,000.00	Rp 183,622,628,000.00
4.3.4.01.01. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp 1,613,250,000.00	Rp 1,613,250,000.00
4.3.4.01.02. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp 182,009,378,000.00	Rp 182,009,378,000.00
4.3.4.01.03. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		
4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah lainnya	Rp 399,025,200,000.00	Rp 399,025,200,000.00
4.3.5.01. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp 399,025,200,000.00	Rp 399,025,200,000.00
<b>JUMLAH</b>	Rp 3,048,932,183,316.26	Rp 2,845,030,033,446.66

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Hasil analisis terhadap data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 dan 2014 (tabel 1 dan tabel 2) diperoleh nilai rasio sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.

TABEL 3 : RASIO KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA SAMARINDA

RASIO	TAHUN 2013	TAHUN 2014
Derajat Desentralisasi	0.13 atau 13%	0.15 atau 15%
Ketertgantungan Keuangan daerah	0.57 atau 57%	0.54 atau 54%
Kemandirian Daerah	0.15 atau 15%	0.18 atau 18%
Efektivitas PAD	1.18 atau 118%	0.75 atau 75%
Efektivitas pajak	1.09 atau 109%	1.06 atau 106%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Kota Samarinda dalam melaksanakan otonomi daerah semakin berhasil. Ini dilihat dari rasio derajat desentralisasi yang mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat proporsinya terhadap total pendapatan daerah.

Sementara itu proporsi dana transfer terhadap total pendapatan semakin turun. Ini dapat dilihat dari nilai rasio ketertgantungan keuangan daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2014. Artinya Kota Samarinda dari sisi keuangan daerahnya semakin otonom atau semakin tidak tergantung pada dana transfer. Dan ini merupakan salah satu gambaran kinerja yang semakin membaik.

Rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013. Artinya kemampuan Kota Samarinda untuk membiayai pembangunan daerahnya dengan menggunakan PAD semakin meningkat. Ini mendukung analisa sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah semakin meningkat.

Dilihat dari rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 kinerja pemerintah daerah untuk memobilisasi penerimaan PAD tergolong sangat efektif. Dimana rasio efektifitas diatas 100%. Target penerimaan PAD terlampaui. Namun di tahun 2014 kemampuan merealisasikan target penerimaan PAD tergolong kurang efektif, target penerimaan PAD tidak tercapai. Hal ini perlu untuk dikaji dan menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda.

Tidak tercapainya target penerimaan bisa disebabkan melemahnya kinerja pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan, dan bisa juga terlalu tingginya dalam menetapkan target penerimaan. Bila dilihat dari tabel 1 dan tabel 2, tidak tercapainya target penerimaan PAD disebabkan oleh tidak tercapainya target retribusi perizinan tertentu, serta sumbangan terbesar berasal dari tidak tercapainya target pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Apabila dilihat dari realisasi penerimaan, untuk pos pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasi penerimaan tahun 2014 lebih besar dari pada tahun 2013. Tetapi karena target tahun 2014 naik empat kali lipat dari target 2013, maka menyebabkan rasio efektifitas PAD menjadi kurang efektif. Dengan demikian kemungkinan besar tidak tercapainya target penerimaan lebih disebabkan dari kurang tepatnya dalam penentuan target penerimaan.

Rasio efektivitas pajak daerah baik tahun 2013 maupun tahun 2014 menunjukkan angka di atas 1 atau lebih dari 100%. Ini artinya, baik tahun 2013 maupun tahun 2014 kemampuan pemerintah Kota Samarinda dalam mengumpulkan pajak daerah tergolong baik, mampu memenuhi jumlah yang ditargetkan. Walaupun tahun 2014 mengalami penurunan, tetapi masih tergolong baik.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan desentralisasi semakin baik, hal ini dapat dilihat dari derajat desentralisasi yang meningkat. Tingkat ketertgantungan keuangan pemerintah Kota Samarinda semakin kecil, serta kemandirian keuangan daerah semakin tinggi. Namun



demikian kemampuan pemerintah Kota Samarinda dalam memobilisasi penerimaan PAD mengalami penurunan, dimana di tahun 2014 tergolong kurang efektif. Berbeda dalam hal efektifitas pajak daerah. Kemampuan pemerintah Kota samarinda dalam menghimpun pajak tergolong baik untuk tahun 2013 maupun tahun 2014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah Kota Samarinda mengalami peningkatan pada tahun 2014.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, 2004, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi, UPP UMP YKPN, Yogyakarta
- Hamzah, Ardi, 2008, Analisa Kinerja Keuangan Terhadap pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan : Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006.
- Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisis kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Ulum, Ihyaul, 2012, Audit Sektor Publik ; Sebuah Pengantar, Bumi Aksara, Jakarta
- Whittaker, James B., The Government Performance and Result Act of 1993;1995, A mandate for Strategic Planning and Performance Measurement, Educational Service Institute, Arlington, Virginia, USA.
- Yusuf, M, 2010, 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju pengelolaan Keuangan Daerah terbaik, Salemba Empat, jakarta.